

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN**

#### **A. PAPARAN DATA**

Bagian ini akan menjelaskan paparan data penelitian yang diperoleh dari lapangan penelitian baik dari hasil observasi, wawancara, maupun dokumentasi. Paparan hasil penelitian diarahkan untuk memberikan jawaban secara menyeluruh mengenai persoalan sebagaimana dirumuskan dalam rumusan masalah.

##### **1. Gambaran Umum Perusahaan**

###### **a. Sejarah Berdirinya BPRS Bhakti Sumekar Sumenep**

Keluarnya Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 25 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom, maka kewenangan otonom saat ini telah diserahkan kepada daerah. Kewenangan tersebut mencakup penanganan segala urusan rumah tangga daerah sebagai lembaga berikut perangkatnya.

Meningkatkan dan mendayagunakan potensi ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Kabupaten Sumenep sangat memerlukan peran lembaga keuangan yang diharapkan dapat memenuhi tujuan tersebut. Lembaga Keuangan tersebut diharapkan dapat meningkatkan dan mendayagunakan perekonomian daerah guna mencapai kesejahteraan masyarakat daerah secara merata. Bentuk lembaga keuangan yang sesuai dengan kondisi daerah Sumenep yang sangat ideal yaitu Lembaga Keuangan Mikro, dalam hal ini adalah Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS).

Untuk memenuhi maksud dan tujuan tersebut Pemerintah Kabupaten Sumenep melakukan akuisisi Bank Perkreditan Rakyat yang berdomosili di Sidoarjo yaitu PT. BPR DANA MERAPI kemudian direlokasi ke Kabupaten Sumenep. Akuisisi terhadap PT. BPR Dana Merapi Pemkab Sumenep membuat *Memorandum of Understanding* (MOU) dan Surat Perjanjian Kerja Sama Pendirian Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) di Kabupaten Sumenep Nomor 910/608b/435.304/200-1011/BMI/PKS/XII/2001 yang ditandatangani oleh Bupati Sumenep dan PT Bank Syariah Muamalat Indonesia, Tbk pada tanggal 27 Desember 2001. *Memorandum of Understanding* tersebut pihak PT. Bank Muamalat sebagai pelaksana dalam proses pengambil alihan BPR serta bertanggung jawab terhadap pemberian konsultasi untuk perijinan, rekrutmen, pelatihan dan pembinaan.<sup>1</sup>

#### **b. Visi, Misi, Dan Budaya BPRS Bhakti Sumekar Sumenep**

Visi dan misi BPRS Bahkti Sumekar Sumenep telah ditetapkan sebagai landasan bagi seluruh *stakeholders* untuk mencapai tujuan bersama. Visi menjadi pegangan bagi seluruh *stakeholders* untuk mentransformasikan diri menjadi salah satu bank BPR syariah terkemuka di Indonesia.

#### **Visi:**

“Terwujudnya masyarakat yang makin sejahtera dengan dilandasi nilai-nilai agama dan budaya.”

#### **Misi:**

- 1) Intermediasi antar pelaku ekonomi yang berlebih dengan yang kurang dalam permodalan berdasar syariah.

---

<sup>1</sup> Laporan Tahunan BPRS Bhakti Sumekar Sumenep.

- 2) Membantu melaksanakan pemberdayaan pengusaha ekonomi kecil dan menengah.
- 3) Mengupayakan peningkatan pendapatan asli daerah.

**Budaya Perusahaan:**

- 1) Berkembang yaitu dengan etos kerja yang kuat serta memiliki ide kreatif yang tinggi dan pengembangan ke masa yang akan datang, mengantisipasi tantangan dan kesempatan untuk berkembang melakukan inovasi-inovasi.
- 2) Harmonis yaitu rasa persaudaraan, rasa kebersamaan menjadi pedoman hidup. Menjadikan kenyamanan dan kekompakan dalam bermitra.
- 3) Amanah yaitu konsisten dalam bertindak adil, bersikap tegas dengan rasa tanggung jawab yang besar dengan amanah nasabah.
- 4) Kepuasan yaitu memenuhi kebutuhan nasabah dengan memberikan pelayanan yang terbaik, dengan tetap memperhatikan kepentingan perusahaan, dengan dukungan SDM yang terampil, ramah, senang melayani dan didukung teknologi unggul.
- 5) Transparan yaitu saling terbuka demi membangun kepercayaan dan keyakinan dengan menjunjung tinggi pelayanan yang terbaik sehingga terbentuk suasana bersih dan berwibawa.
- 6) Integritas yaitu bertakwa, penuh dedikasi, jujur, selalu menjaga nama baik, serta taat pada aturan yang berlaku.

### **c. Struktur organisasi BPRS Bhakti Sumekar Sumenep**

Struktur organisasi dapat berpengaruh terhadap kelancaran perusahaan atau bank dan terciptanya koordinasi yang baik antar personil serta dapat memperjelas pembagian tugas dan garis wewenang yang berlaku. Keberhasilan perusahaan atau bank juga ditunjang dari sistem pengorganisasian yang baik dan jelas. Organisasi memberikan arah yang baik kepada setiap unsur dalam aktivitas tertentu untuk melakukan suatu pekerjaan yang telah ditetapkan.

#### 1) Pengurus BPRS Bhakti Sumekar Sumenep

##### **Dewan Komisaris**

- a) Drs. R. Idris, MM.
- b) KH. M. Taufiq Rachman FM.

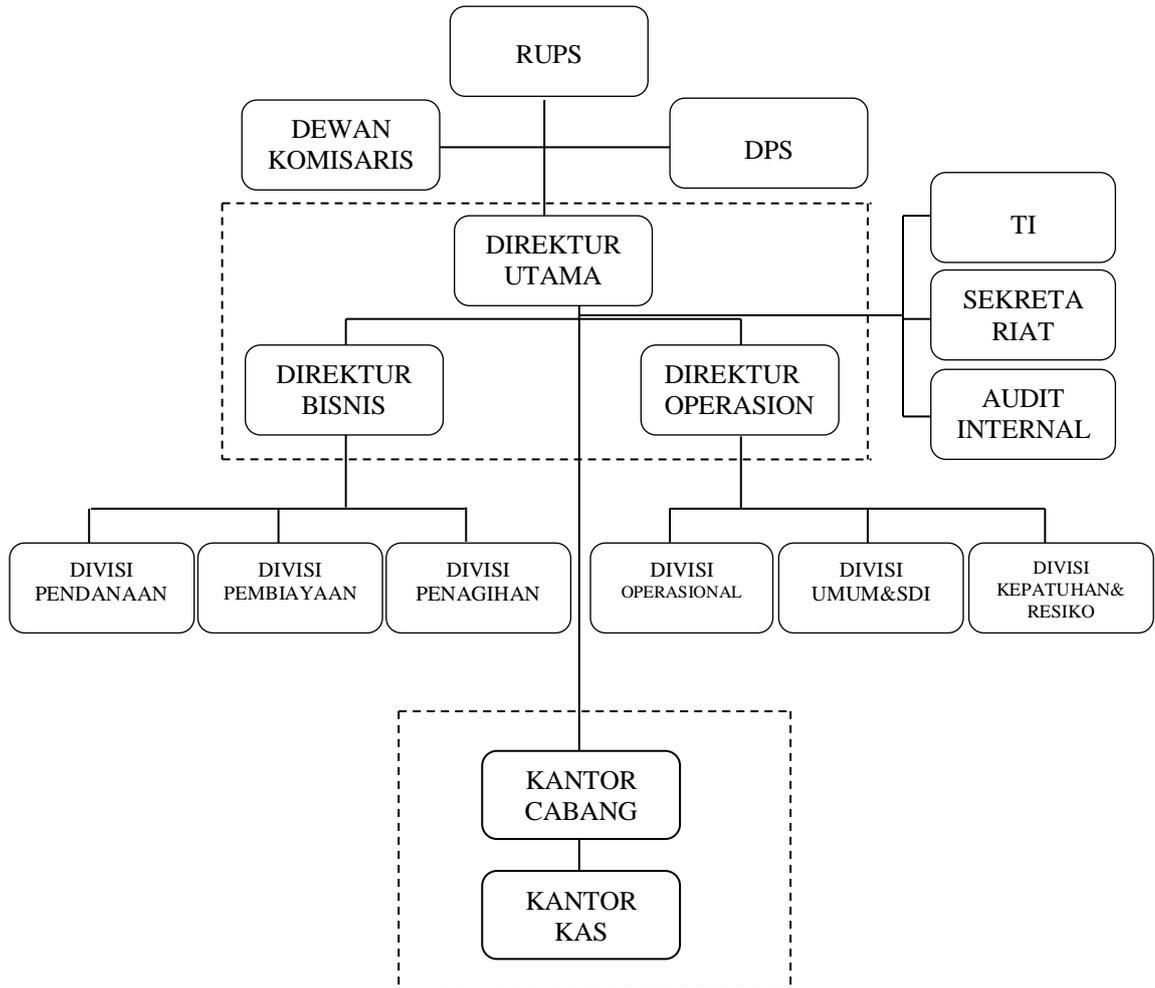
##### **Dewan Pengawas Syariah**

- a) DR. KH. Achmad Muhammad Tidjani, Lc. MA.
- b) Arina Haqan, SH.I., M.EI.
- c) Drs. KH. Ahmad Washil, M.Pd.I.

##### **Direksi**

- a) Novi Sujatmiko
- b) Hairil Fajar
- c) Cahya Wiratama

**Gambar 4.1**  
**Stuktur Organisai**



2) *Job description* dalam setiap bagian :

a) RUPS/RAT

RUPS/ RAT merupakan organ organisasi yang mempunyai kekuasaan tertinggi untuk menetapkan anggaran dasar dan perubahannya, mengangkat dan memberhentikan pengurus bank dan dewan pengawas syariah, dan menetapkan perubahan modal, tujuan perusahaan dan pembagian laba.

b) Dewan Komisaris

Dewan komisaris bertugas mengelola likuiditas bank dan menetapkan semua kebijakan bank yang dipimpinnya. Dan fungsi dewan komisaris yaitu melakukan pengawasan dan memberikan pengarahan kepada direksi dalam menjalankan perseroan, mempertimbangkan dan memutuskan permohonan penyaluran dana yang jumlahnya melebihi maksimum yang dapat diputuskan direksi, penanggung jawab bank manajemen, penanggung jawab operasional bank secara keseluruhan, dan bersama direksi dalam hubungan *check and balance* bertanggungjawab untuk menjaga kelangsungan usaha dan kesehatan bank .

c) Dewan Pengawas Syariah

Dewan pengawas syariah bertugas mengawasi, mengkaji dan menilai, memberi opini terhadap, kesesuaian pedoman operasional, produk, dan kegiatan operasional terhadap fatwa Dewan Syariah Nasional, mengawasi operasional bank dan produk-produk bank yang sesuai dengan ketentuan syariat, melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang BPRS pada khususnya dan meluas tentang ekonomi islam, dan menciptakan dan menumbuhkembangkan nilai-nilai Islam pada BPRS dan lembaga keuangan lainnya.

d) Direktur

Direktur bertugas mengelola dan mengawasi secara langsung pada seluruh kegiatan operasional bank. Direktur juga berfungsi untuk memimpin usaha bank, merencanakan, menkoordinasikan, melindungi aset, mengendalikan seluruh kegiatan operasional bank, menjalin hubungan silaturahmi, sebagai pimpinan dan pelaksana seluruh kebijakan dari rapat umum pemegang saham, dan bersama

dewan komisaris dalam hubungan *check and balance* bertanggungjawab untuk menjaga kelangsungan usaha dan kesehatan bank.

e) Internal auditor

Internal auditor bertanggungjawab untuk memeriksa dan melaporkan pengawasan internal atas posisi keuangan bank serta segala hasil aktifitas operasional bank, mengadakan pemeriksaan secara berkala atau mendadak ke setiap bagian, serta memastikan kebenaran data keuangan dan data lainnya yang terkait dengan aktifitas bank, memberikan saran kepada masing-masing bagian untuk menghasilkan suatu sistem pengawasan internal yang kuat, bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas, dan bertanggungjawab dan wewenang kepada direksi dan tembusan kepada dewan komisaris

f) Pengawasan dan kepatuhan pembiayaan

Pengawasan dan kepatuhan pembiayaan bertugas untuk mengamati posisi pembiayaan yang mengalami keterlambatan/kemacetan, dan mengusahakan agar pelunasannya dilaksanakan sesuai perjanjian, melakukan upaya penagihan terhadap pelunasan pembiayaan yang non lancar, menjalankan proses negosiasi upaya penyelesaian pembiayaan macet, dan menjalankan proses eksekusi jaminan nasabah .

g) Kepala Bagian Marketing/pemasaran

Kepala bagian pemasaran bertugas mengkoordinasi antar unit kerja di lingkungan perusahaan agar dapat memberi pelayanan jasa perbankan kepada nasabah secara efektif dan efisien, menyusun strategi pemasaran bank dalam menghimpun dana masyarakat maupun dalam pengalokasian kredit / pembiayaan pada masyarakat, melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi terhadap

portofolio kredit / pembiayaan dan menyampaikan saran, opini kepada pihak direksi mengenai masalah yang berkaitan dengan bidang pemasaran dan perkreditan. Dan juga berfungsi untuk merencanakan, mengarahkan, mengevaluasi dan mengawasi target funding dan financing serta memastikan strategi yang digunakan tepat sasaran termasuk penyelesaian pembiayaan bermasalah, sebagai anggota komite kredit dalam hal pengembalian keputusan kredit, sebagai aparat manajemen yang membantu pihak direksi dalam menangani tugas khususnya yang menyangkut bidang marketing dan perkreditan dan bertanggungjawab kepada direksi.

h) *Account Officer* pendanaan

*Account officer* pendanaan bertugas untuk mempromosikan produk bank, menghimpun dana pihak ketiga dan dana untuk setoran modal, menjaga hubungan baik dengan nasabah dan kualitas layanan bank dan *monitoring* rekening aktif dan pasif.

i) *Account Officer* pembiayaan

*Account officer* pembiayaan bertugas melayani nasabah yang memerlukan pelayanan kredit dan atau jasa perbankan lainnya, bekerjasama dengan bagian lain khususnya hukum / investigasi dalam analisa kredit untuk mendapatkan informasi yang dapat dipercaya sehingga dapat menjaga mutu pelayanan, membuat analisa ekonomi/analisa kredit untuk setiap proses pemberian kredit, mengajukan rekomendasi atas hasil analisa kredit calon nasabah kepada komite kredi, dan memberikan *monitoring* pembinaan dan pengawasan atas setiap kredit yang diberikan. Dan juga berfungsi sebagai staf bank yang menangani pemberian kredit

serta melakukan pembinaan dan pengawasan kredit yang telah diberikan berdasarkan kelayakan, kelaziman dan prinsip pemberian yang wajar

j) Remedial (penyelesaian pembiayaan bermasalah)

Remedial bertugas untuk mengidentifikasi nasabah yang kurang lancar dan diklasifikasikan berdasarkan wilayah dan plafond, melakukan komite pembiayaan atas setiap permasalahan yang ditemukan pada nasabah, mengadministrasikan berita acara pembinaan, pernyataan, rescheduling, dan instrument penagihan, melakukan penarikan asset / jaminan kepada nasabah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan perusahaan, dan membuat evaluasi remedial dan rencana kerja bulan berikutnya. Dan juga berfungsi sebagai staf yang melaksanakan kebijakan direksi dalam bidang remedial dan atau pembiayaan, anggota komite pembiayaan, berupaya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, dan melaksanakan diskusi di intern perusahaan yang berkaitan dengan bidang kerjanya

k) Kepala Bagian Operasional

Kepala bagian operasional bertugas melayani tugas harian dengan aktif pada setiap bagian yang ada di bawah tanggung jawabnya, melaksanakan supervise setiap pelayanan, dan mengamati jasa-jasa perbankan dari setiap bagian. Dan juga berfungsi untuk merencanakan, mengarahkan, mengawasi serta mengevaluasi seluruh aktifitas operasional (internal – eksternal), sebagai aparat manajemen yang membantu pihak direksi sesuai tugasnya di bidang operasional bank, dan bertanggungjawab kepada direksi .

l) *Customer Service*

*Customer Service* bertugas melayani jasa perbankan khususnya tabungan dan deposito kepada nasabah, melakukan administrasi pembukuan atas setiap transaksi penarikan uang dan pemindahbukuan dari rekening tabungan, deposito atau lainnya, dan melakukan administrasi pembukuan atas setiap transaksi untuk nasabah maupun untuk bank sendiri.

m) Teller

Teller bertugas untuk melayani nasabah dalam penggunaan slip (penarikan, penyetoran, dan lain-lain), memberikan layanan informasi kepada nasabah dalam melakukan transaksi tabungan, deposito, cek dan sebagainya, melaksanakan kegiatan administrasi, dan mencatat pembukuan dalam buku besar untuk seluruh transaksi penyetoran maupun pengeluaran setiap harinya. Dan juga berfungsi sebagai staf yang mengurus dan mencatat keluar masuknya uang sebagai laporan yang dapat dipertanggungjawabkan.

n) Legal

Legal bertugas mengikuti perkembangan proses permohonan pembiayaan nasabah, khususnya dalam hal kelengkapan dokumen permohonan, melakukan survey ke lapangan untuk melakukan pengecekan agunan pembiayaan nasabah, menilai secara hukum agunan pembiayaan yang diajukan nasabah, melakukan proses penandatanganan akad pembiayaan bersama nasabah, bertanggungjawab atas penyimpanan dan pengeluaran dokumen perjanjian dan jaminan nasabah, mengatur dan melaksanakan eksekusi agunan nasabah, dan mengajukan dan menjawab perkara ke pengadilan.

o) Administrasi pembiayaan

Administrasi pembiayaan bertugas memeriksa dan mengurus kelengkapan dokumen - dokumen yang terkait dengan pembiayaan yang akan atau telah diberikan, seperti dokumen agunan, dan data lainnya, menyiapkan surat - surat perjanjian dan surat pengikatan agunan yang terkait dengan pengajuan pembiayaan nasabah, mengawasi dan bertanggungjawab atas pengarsipan semua dokumen pembiayaan nasabah, khususnya berkas jaminan pembiayaan nasabah, dan menghitung, mencatat dan melakukan pembayaran atas asuransi, jasa proses pengikatan atau pemblokiran jaminan nasabah kepada pihak lain.

p) *Accounting*/pembukuan

*Accounting* bertugas mengatur dan mengkoordinasikan semua hasil kegiatan operasional, memeriksa kelengkapan bukti – bukti transaksi pembukuan, melakukan proses distribusi pendapatan bulanan, dan hasilnya diimplementasikan dalam perhitungan bagi hasil tabungan dan deposito, dan menyusun laporan keuangan berkala dan laporan keuangan lainnya.

q) Kepala bagian personalia dan umum

Kepala bagian personalia dan umum bertugas merencanakan, mengevaluasi kinerja dan perencanaan karir, merencanakan, mengkoordinasikan bidang umum (internal dan eksternal), dan bertanggungjawab kepada direksi.

r) Logistik dan umum

Logistik dan umum bertugas untuk mengelola dan mencatat pengeluaran dan pemasukan biaya-biaya umum harian, menyediakan dan mengawasi penggunaan perlengkapan/peralatan kantor, dan mengadministrasikan pelaksanaan penyusutan dan amortisasi sesuai produser akuntansi.

s) Staf Umum

Staf umum bertugas untuk mengadministrasikan seluruh file-file yang berhubungan dengan pajak, ketenagakerjaan, periklanan, kerjasama dengan pihak Dispenda dan lainnya, menata sumber-sumber bacaan (buku-buku, diktat, paper, hasil riset, kliping, majalah, dll) yang ada di perusahaan sehingga untuk dijadikan sebagai bahan rujukan dalam melaksanakan tugas, dan mengagendakan seluruh aktifitas surat menyurat baik antar unit maupun dengan pihak luar sehingga dapat memberikan informasi secara cepat dan tepat. Dan juga berfungsi sebagai staf yang membantu bidang umum dan SDM terutama dalam hal administrasi umum, dan administrasi yang berhubungan dengan intern maupun ekstern bank

t) Personalia dan Pajak

Personalia dan pajak bertugas mengatur dan mengawasi semua aktifitas dan administrasi kepegawaian, melakukan seleksi atas penerimaan pegawai baru sesuai kebutuhan, mengurus perubahan status/jabatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai, bertanggungjawab dalam perhitungan gaji beserta hal-hal yang terkait dengan gaji, bertanggungjawab dalam upaya peningkatan kuliatas SDM, memberikan informasi kepegawaian serta menampung keluhan – keluhan yang diajukan pegawai serta mengajukan solusinya, dan melakukan dan mencatat pembayaran kewajiban pajak kepada instansi pemerintah, serta kewajiban lainnya kepada pihak lain.

u) Satuan Pengamanan/Staff Pembantu

Satuan pengaman bertugas melakukan pemeriksaan sebelum dan setelah kantor beraktifitas, terutama menyangkut bidang pengamanan secara terpadu dan menyeluruh, memberikan pelayanan keamanan dana penyetoran dan pengambilan

nasabah selama jam kerja, menangani dan menciptakan masalah ketertiban lingkungan perusahaan agar merasa nyaman dalam bertransaksi, melaporkan hasil pengawasan perusahaan kepada atasannya satu kali dalam seminggu. Dan berfungsi sebagai staf yang membantu keamanan karyawan dan atau perusahaan, agar dalam menjalankan tugasnya merasa aman, dan melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan kebijakan pihak direksi

v) Kepala kantor cabang

Kepala kantor cabang bertugas memimpin dan mengendalikan kantor cabang, setingkat dengan kepala bagian, dan bertanggungjawab kepada direksi.

**d. Produk Dan Layanan BPRS Bhakti Sumekar Sumenep**

Produk-produk dan layanan yang dijalankan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar Sumenep sebagai berikut:

1) Produk Pendanaan

- a) Tabungan Barokah
- b) Tabungan Simpanan Pelajar iB
- c) Tabungan Qurban
- d) Tabungan Haji
- e) Tabungan Umrah
- f) Tabungan Hari Raya Deposito Mudharabah

2) Produk Pembiayaan

- a) Pembiayaan Serba Guna
- b) Pembiayaan Kendaraan
- c) Pembiayaan Modal Kerja UMKM
- d) Pembiayaan Talangan Umrah

- e) Pembiayaan Rahn-Emas
  - f) Pembiayaan Pensiunan
  - g) Pembiayaan Al Qordhul Hasan
  - h) Pembiayaan Elektronik
  - i) Pembiayaan Kepemilikan Rumah
  - j) Pembiayaan Pusyar iB
  - k) Pembiayaan Sadar Bersih
  - l) Pembiayaan Kepemilikan Emas
  - m) Pembiayaan Linkage UMKM Primer
  - n) Pembiayaan Ijarah
- 3) Produk Layanan
- a) Jasa Kiriman Uang
  - b) Pembiayaan Gaji/Intensif Bagi PNS/Karyawan Swasta/Guru
  - c) Layanan Multibiller
  - d) BPRS BS Notifikasi
  - e) Layanan ATM Tanpa Kartu

## 2. Data Lapangan

### a. Prosedur Penyaluran Produk Pembiayaan *Mudharabah* Di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep

Pembiayaan *mudharabah* merupakan salah satu produk pembiayaan yang ada di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep. Menurut BPRS Bhakti Sumekar Sumenep *mudharabah* merupakan akad kerjasama usaha antara bank sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan nasabah sebagai pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha dengan nisbah pembagian hasil menurut kesepakatan dimuka. Prinsipnya dalam penyaluran *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan maka bank dapat meminta jaminan dari pengelola dana.<sup>2</sup> Seperti yang disampaikan oleh Ibu Retha selaku bagian admin pembiayaan *mudhrabah* di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep:

“Pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan dengan akad bagi hasil antara pihak bank dan nasabah untuk melakukan usaha bersama, dengan beberapa ketentuan yang sudah disepakati dan juga harus sesuai dengan syariah. Pembiayaan yang ada di BPRS Bahkti Sumekar beragam. Pembiayaan yang sering dilakukan biasanya pembiayaan dengan akad murabahah dan musyarakah, sedangkan pembiayaan *mudharabah* sendiri memiliki sedikit peminat”<sup>3</sup>

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Hasyim selaku kepala bagian divisi audit internal, yaitu:

“Pembiayaan *mudharabah* yaitu bank menyediakan modal usaha untuk nasabah melakukan usaha dengan akad bagi hasil, dimana nasabah ini sebelumnya sudah mempunyai usaha. Pembiayaan *mudharabah* di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep ada, namun memiliki sedikit peminat. Hal

---

<sup>2</sup> Laporan Tahunan PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep

<sup>3</sup>Retha, Admin Pembiayaan *Mudharabah* BPRS Bhakti Sumekar Sumenep, Wawancara langsung, (14 Januari 2020).

tersebut disebabkan terbatasnya usaha yang sesuai dengan ketentuan yang ada.”<sup>4</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut disimpulkan bahwa pembiayaan *mudharabah* merupakan akad kerja sama antara bank sebagai pemilik dana dan nasabah sebagai pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha yang tidak melanggar syariah dengan nisbah sesuai dengan kesepakatan diawal, dimana nasabah disini sebelumnya sudah memiliki usaha.

Pembiayaan *Mudharabah* di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep memiliki sedikit nasabah, hal tersebut dikarenakan terbatasnya usaha yang sesuai dengan ketentuan yang ada pada BPRS Bhakti Sumekar Sumenep. Pembiayaan *mudharabah* di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep mengalami sedikit peningkatan tahun 2017 sebanyak 46 rekening, tahun 2018 sebanyak 62 rekening, dan 2019 sebanyak 87 rekening. Hal ini menandakan semakin menambah kepercayaan nasabah dalam mengembangkan usaha.

Dokumen pembiayaan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam proses pembiayaan, dimulai dari awal proses pembiayaan sampai pelunasan pembiayaan. Dokumen pembiayaan sangat penting untuk membantu lancarnya proses pembiayaan, selain itu dapat memberikan informasi secara legal dan dapat dipercaya. Dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pembiayaan *mudharabah* yaitu:

- 1) Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Suami dan Istri
- 2) Foto Copy Kartu Susunan Keluarga
- 3) Foto Copy Surat Nikah
- 4) Foto Copy Surat Izin Usaha Perdagangan

---

<sup>4</sup> Muhammad Hasyim Asyari, Kepala Divisi Audit Internal BPRS Bhakti Sumekar Sumenep, Wawancara langsung, (14 Januari 2020).

- 5) Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan/Tanda Daftar Industri
- 6) Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak Pribadi
- 7) Surat Keterangan Usaha dari Kepala Desa
- 8) Foto Copy Jaminan (SHM / BPKB dan STNK)
- 9) Surat Tanda Kepemilikan Kendaraan dari Kepala Desa jika jaminan berupa kendaraan
- 10) Gesek Nomer Rangka dan Nomer Mesin.

Proses pembiayaan diawali dengan adanya permohonan pembiayaan oleh nasabah. Permohonan pembiayaan *mudharabah* di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep mempunyai beberapa tahapan prosedur. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Retha selaku bagian administrasi pembiayaan *mudharabah* yaitu:

“Dalam melakukan pembiayaan ada beberapa tahapan yaitu, Nasabah datang langsung menemui admin pembiayaan di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep untuk menyampaikan maksud dan tujuan dalam melakukan pembiayaan dan memilih akad pembiayaan sesuai yang dibutuhkan. Mengisi lembar permohonan pembiayaan *mudharabah* untuk melakukan pengajuan pembiayaan, lembar pengajuan disini berisi data-data nasabah akad yang dipilih dan juga dokumen lainnya. Setelah syarat-syarat dilengkapi, akan ditunjuk lalu *Account Officier* (AO) yang akan melakukan evaluasi, survei lapangan dan *monitoring*. Hasil survei akan diolah dan dilaporkan kepada komite pembiayaan. Setelah itu, *Account Officier* bersama komite pembiayaan akan memutuskan pembiayaan layak atau tidak untuk diberikan. Pembiayaan ditolak akan diberikan surat penolakan beserta dengan alasan secara resmi. Pembiayaan diterima, nasabah akan datang ke BPRS Bhaktik Sumekar Sumenep untuk melakukan pembacaan akad dan perjanjian, dan juga pencairan pembiayaan.”<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Retha, Admin Pembiayaan *Mudharabah* BPRS Bhakti Sumekar Sumenep, Wawancara langsung, (14 Januari 2020).

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Hasyim selaku kepala bagian divisi audit internal, yaitu:

“Prosedur pembiayaan *mudharabah* yaitu, nasabah melakukan permohonan pembiayaan dilengkapi persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan kepada admin pembiayaan. Setelah diregister oleh admin pembiayaan, dan data nasabah dicek oleh bagian Sistem Informasi Debitur melalui BI Cheking. Setelah itu akan ditentukan *Account Officier* yang bertanggung jawab dalam pembiayaan tersebut. *Account Officier* disini bertugas menilai usaha yang dilakukan nasabah sudah memenuhi kriteria yang ada atau tidak. Hasil dari data lapangan akan dilaporkan dan dipertimbangkan bersama komite pembiayaan, komite dan *Account Officier* disini akan memutuskan pembiayaan tersebut layak atau tidak diberikan. Jika pembiayaan disetujui semua syarat terpenuhi baru akan melakukan tanda tangan akad dan pencairan pada bagian teller.”<sup>6</sup>

Disimpulkan bahwa permohonan pembiayaan *mudharabah* di BPRS Bhakti Sumekar melalui beberapa tahapan prosedur pembiayaan. Tahapan tersebut akan terlaksana sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada. Dimulai dari permohonan, penilaian, persetujuan, serta akad dan juga pencairan pembiayaan.

#### **b. Pengendalian Internal Pada Prosedur Penyaluran Produk Pembiayaan *Mudharabah* Di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep**

Pengendalian internal oleh BPRS Bhakti Sumekar Sumenep dalam prosedur penyaluran produk pembiayaan *mudharabah* dilakukan sebelum adanya pembiayaan yaitu, digambarkan dengan pemisahan fungsi dan tugas antara masing-masing bagian dalam melakukan proses pembiayaan sesuai dengan stuktur organisadi yang ada. Setiap bagian bertanggung jawab atas tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian tersebut. Tujuan dari pemisahan tugas dan fungsi tersebut untuk mencegah suatu resiko yang akan terjadi.

---

<sup>6</sup> Muhammad Hasyim Asyari, Kepala Divisi Audit Internal BPRS Bhakti Sumekar Sumenep, Wawancara langsung, (14 Januari 2020).

Lingkungan pengendalian internal menjadi arahan dan kesadaran bagi BPRS Bhakti Sumekar Sumenep. Hal digambarkan dengan sikap pelayanan di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep sudah baik. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hasyim selaku kepala bagian divisi audit internal, yaitu:

“Integritas dan etika salah satunya dengan 3S (Salam, Senyum, dan Sapa). Integritas dan etika merupakan hal yang harus dijunjung tinggi dalam pelayanan nasabah. Karyawan ditraining sebelum ditempatkan sesuai dengan bidang kemampuannya , dan juga ditunjang dengan pelatihan-pelatihan karyawan atau juga *workshop*. Setiap pekan akan diadakan rapat untuk membahas tentang pengawasan-pengawasan bersama dewan komisaris dan komite audit. Di BPRS sendiri biasanya akan didakan *reward* setiap tahunnya sebagai penghargaan kepada karyawan yang memiliki kinerja yang sangat baik”<sup>7</sup>

Dapat disimpulkan lingkungan pengendalian internal di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep sudah berjalan dengan baik. Penilaian risiko mencakup semua aspek dan menentukan kekuatan di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep melalui evaluasi risiko. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hasyim selaku kepala bagian divisi audit internal, yaitu:

“Setiap organisasi pasti memiliki tujuan bersama dalam hal itu maka seluruh yang ada dalam organisasi tersebut harus mencapainya untuk memberikan pelayanan yang baik pada masyarakat. Setiap divisi juga mempunyai rencana kerja yang harus dicapai. Untuk mencapainya tersebut perlu diadakan penilaian risiko untuk mencapainya. Setiap divisi akan mengadakan agenda rapat rutin untuk hal tersebut.”<sup>8</sup>

Dapat disimpulkan penilaian risiko sangat diperlukan dalam aktivitas pengendalian di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep. Aktivitas pengendalian internal di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep juga dilakukan dengan pengamanan dengan memberikan nomer urut pada setiap formulir permohonan pembiayaan yang biasa

---

<sup>7</sup> Muhammad Hasyim Asyari, Kepala Divisi Audit Internal BPRS Bhakti Sumekar Sumenep, Wawancara langsung, (20 Maret 2020).

<sup>8</sup> Muhammad Hasyim Asyari, Kepala Divisi Audit Internal BPRS Bhakti Sumekar Sumenep, Wawancara langsung, (20 Maret 2020).

disebut nomer register. Setiap transaksi akan melalui proses registrasi, salah satu tujuannya yaitu memudahkan pengawasan dalam aktivitas kerja yang otomatis. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Retha selaku bagian admin pembiayaan *mudharabah* di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep:

“Setiap pengajuan permohonan pembiayaan yang dilakukan nasabah akan diinput dalam sistem, secara otomatis nanti akan mendapatkan nomer register. Nomer register ini akan menjaga keamanan data dan mempermudah dalam proses pembiayaan yang akan dilakukan oleh nasabah. Setiap dilakukan transaksi yang berkaitan dengan pembiayaan tersebut akan menggunakan nomer register tersebut.”<sup>9</sup>

Dapat disimpulkan setiap permohonan pembiayaan akan mendapatkan nomer register untuk memudahkan setiap transaksi dan juga untuk menjaga keamanan yaitu memudahkan pengawasan dalam aktivitas kerja yang otomatis di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep.

Setiap pengajuan pembiayaan *mudharabah* pada BPRS Bahkti Sumekar Sumenep nasabah akan mengajukan nominal pembiayaan. Pemberian nominal didasarkan pada jaminan yang ada, kemampuan nasabah dalam membayar, dan juga kebutuhan usaha nasabah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Retha selaku bagian admin pembiayaan *mudhrabah* di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep:

“Setiap pemberian pembiayaan nasabah bebas mengajukan nominal yang diinginkan. *Account Officier* yang bertugas untuk menilai dan mensurvei data usaha nasabah akan menentukan keputusan pembiayaan tersebut. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep sendiri mempunyai batasan-batasan dalam pemberian pembiayaan. Nominal yang diberikan tergantung keputusan *Account Officier* dan komite setelah dilakukan survei. Jaminan juga menjadi tolak ukur dalam keputusan pemberian pembiayaan.”<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Retha, Admin Pembiayaan *Mudharabah* BPRS Bhakti Sumekar Sumenep, Wawancara langsung, (14 Januari 2020).

<sup>10</sup> Retha, Admin Pembiayaan *Mudharabah* BPRS Bhakti Sumekar Sumenep, Wawancara langsung, (14 Januari 2020).

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Hasyim selaku kepala bagian divisi audit internal, yaitu:

“Batasan pemberian pembiayaan tergantung hasil survei seperti usaha yang diberi biayai, jaminan yang diberikan, dan juga lainnya. *Account Officier* berperan penting dalam tahap ini, karena *Account Officier* yang akan datang langsung ke lapangan untuk menilai usaha nasabah tersebut. Selain itu juga ada persetujuan dari beberapa bagian dalam BPRS Bhakti Sumekar tergantung nominal yang diajukan. Batasan pembiayaan penting, agar mencegah terjadinya pembiayaan macet, pemberian pembiayaan disesuaikan dengan kemampuan nasabah.”

Dapat disimpulkan, pemberian batasan pembiayaan sangat penting untuk mengukur kemampuan nasabah dalam membayar, untuk mencegah adanya pembiayaan macet. Setiap pemberian pembiayaan disesuaikan dengan kemampuan nasabah, usaha yang dilakukan, jaminan yang diberikan dan juga lainnya.

Jaminan merupakan asset yang dimiliki oleh nasabah yang dijanjikan kepada BPRS Bhakti Sumekar Sumenep, jika nasabah tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hasyim selaku kepala bagian divisi audit internal, yaitu:

“Setiap pemberian pembiayaan pasti disertai jaminan untuk mengamankan pembayaran kembali pembiayaan jika nasabah ingkar janji. Jaminan yang diberikan nasabah nanti akan dicek absahannya. Hal ini untuk mengantisipasi adanya ketidak benaran jaminan, bisa bukan milik sendiri, atau jaminan ini sebenarnya tidak ada. Jaminan disini sangat penting adanya, agar dapat dijual ketika nasabah tidak mampu dalam membayar tanggungan kepada BPRS Bhakti Sumekar Sumenep.”<sup>11</sup>

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan, setiap permohonan pembiayaan harus disertai dengan jaminan. Jaminan ini juga bisa menentukan permohonan pembiayaan yang kita ajukan diterima atau ditolak dan sebagai tolak

---

<sup>11</sup> Muhammad Hasyim Asyari, Kepala Divisi Audit Internal BPRS Bhakti Sumekar Sumenep, Wawancara langsung, (14 Januari 2020).

ukur pemberian nominal pembiayaan yang diberikan oleh BPRS Bhakti Sumekar Sumenep.

Pembiayaan dalam suatu bank tidak akan lepas dari pembiayaan macet, sebelum terjadi pembiayaan macet terjadi beberapa tahapan sebelum pembiayaan itu dikatakan pembiayaan macet. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hasyim selaku kepala bagian divisi audit internal, yaitu:

“Pembiayaan dikatakan pembiayaan macet setelah tidak membayar angsuran sebanyak 9 kali. Tiga kali tidak membayar dianggap kurang lancar, enam kali tidak membayar dianggap meragukan, dan sembilan tidak membayar dianggap pembiayaan macet. Sebelum terjadi pembiayaan macet akan dilakukan peringatan, setelah terjadi peringatan tetap tidak membayar sesuai waktu yang ditentukan akan ada surat penagihan langsung untuk nasabah. Setelah terjadi pembiayaan macet, jika ada jaminan maka jaminan yang ada pada bank akan dilelang.”<sup>12</sup>

Pembiayaan pada BPRS Bhakti Sumekar Sumenep ada tahapan-tahapan sebelum pembiayaan tersebut dikatakan pembiayaan macet. Pembiayaan kurang lancar apabila nasabah tidak membayar angsuran sebanyak tiga kali, enam kali tidak membayar pembiayaan diragukan, dan sembilan kali tidak membayar dianggap pembiayaan macet. Pembiayaan kurang lancar, pihak bank atau *Account Officier* yang bertanggung jawab memberi peringatan pada pihak nasabah agar membayar angsuran. Pembiayaan diragukan, pihak bank atau *Account Officier* akan memberi peringatan terhadap nasabah sekaligus memberi surat penagihan. Pembiayaan macet, pihak bank atau *Account Officier* akan melaporkan terhadap bagian pengawasan beserta dengan surat penagihan terhadap nasabah. Nasabah yang tidak mampu membayar, jaminan yang sudah ada di BPRS Bhakti Sumekar akan dilakukan pelelangan.

---

<sup>12</sup> Muhammad Hasyim Asyari, Kepala Divisi Audit Internal BPRS Bhakti Sumekar Sumenep, Wawancara langsung, (14 Januari 2020).

Informasi dan komunikasi tentang operasi pengendalian internal memberikan substansi yang dapat digunakan manajemen untuk mengelola organisasinya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hasyim selaku kepala bagian divisi audit internal, yaitu:

“Informasi mengenai BPRS Bhakti Sumekar Sumenep bisa dilihat diwebsite BPRS Bhakti Sumekar Sumenep, disana juga dipublikasikan laporan keuangan setiap triwulan dan juga laporan tahunan. Hal ini untuk memberikan informasi kepada nasabah dan juga masyarakat, sebagai bentuk keterbukaan antara pihak BPRS Bhakti Sumekar Sumenep dan masyarakat. Komunikasi antara setiap karyawan sangat diperlukan, apalagi mengenai kendala-kendaya yang dihadapi masing-masing karyawan.”<sup>13</sup>

Dapat disimpulkan informasi dan komunikasi BPRS Bhakti Sumekar Sumenep sudah berjalan dengan baik. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep dalam pengawasan memiliki Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) yang mempunyai fungsi independen bertanggung jawab langsung kepada direktur utama. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hasyim selaku kepala bagian divisi audit internal, yaitu:

“Pada BPRS Bhakti Sumekar Sumenep memiliki bagian/divisi audit internal disini memiliki beberapa bagian. Dalam divisi ini juga terdapat pengawas pembiayaan yang bertugas mengawasi setiap pembiayaan yang dilakukan oleh BPRS Bhakti Sumekar Sumenep. Divisi audit internal juga melakukan pemeriksaan secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan, atau juga sesuai dengan perencanaan audit yang sudah ditetapkan. Selain memiliki audit internal BPRS juga memiliki auditor eksternal yaitu KAP, Inspektorat, dan juga OJK, untuk auditor eksternal sendiri dilakukan setiap setahun sekali.”<sup>14</sup>

Dapat disimpulkan divisi audit disini memiliki peran dan fungsi dalam langkah pengawasan perihal pemeriksaan dan fungsi dalam langkah pengawasan perihal pemeriksaan dan meyakinkan apakah seluruh kebijaksanaan atau kesatuan

---

<sup>13</sup> Muhammad Hasyim Asyari, Kepala Divisi Audit Internal BPRS Bhakti Sumekar Sumenep, Wawancara langsung, (20 Maret 2020).

<sup>14</sup> Muhammad Hasyim Asyari, Kepala Divisi Audit Internal BPRS Bhakti Sumekar Sumenep, Wawancara langsung, (28 Januari 2020).

dan prosedur yang ditetapkan sebelumnya dilaksanakan dan ditaati dengan baik. Bhakti Sumekar Sumenep juga memiliki rekanan audit independen yang melakukan fungsi pengawasan dari luar perusahaan. Bentuk pengawasan ini sangat penting dilakukan selain untuk kemajuan bank sendiri, tapi juga untuk memperoleh kepercayaan oleh masyarakat.

## **B. TEMUAN PENELITIAN**

Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti dari berbagai macam pengumpulan data, baik dari observasi, wawancara dan dokumentasi, maka penulis mengemukakan bahwa Pengendalian Internal Pada Prosedur Produk Pembiayaan *Mudharabah* Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar Sumenep sebagai berikut:

### **1. Prosedur Penyaluran Produk Pembiayaan *Mudharabah* Di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep**

- a. Dalam pembiayaan *mudharabah* BPRS Bhakti Sumekar Sumenep memberikan pembiayaan kepada usaha yang sudah berdiri sebelumnya serta memiliki izin usaha. Dalam pembiayaan *mudharabah* nasabah diharuskan memenuhi dokumen-dokumen dalam pengajuan pembiayaan. Dokumen tersebut berupa KTP, KK, SIUP, NPWP, dan juga lainnya.
- b. Dalam pembiayaan *mudharabah* terdapat tahapan prosedur pembiayaan yang harus dilakukan oleh nasabah dan juga pihak BPRS yaitu, permohonan, penilaian, persetujuan, dan pelaksanaan dan realisasi pembiayaan.

## **2. Pengendalian Internal Pada Prosedur Penyaluran Produk Pembiayaan *Mudharabah* Di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep**

- a. Pengendalian internal pada BPRS Bhakti Sumekar Sumenep dilakukan dengan pemisahaan tugas dan fungsi masing-masing bagian, untuk meminimalkan terjadinya kecurangan.
- b. Pengendalian internal dilakukan dengan pemberian nomer register setiap permohonan pembiayaan, untuk memudahkan dan juga mengamankan pembiayaan.
- c. Pengendalian internal dilakukan dengan memberikan batasan terhadap nominal pembiayaan yang diajukan nasabah disesuaikan dengan kemampuan dan usaha yang dilakukan nasabah. Dan pemberian jaminan nasabah, sebagai tolak ukur pemberian nominal pembiayaan dan juga sebagai legalitas nasabah.
- d. Pengendalian internal juga digambarkan dengan adanya SKAI dan juga rekanan audit internal yang melakukan fungsi pengawasan dari luar BPRS Bhakti Sumekar Sumenep.

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Prosedur Penyaluran Produk Pembiayaan *Mudharabah* Di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep**

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Akad *mudharabah* dalam pembiayaan merupakan akad kerja sama suatu usaha antara banyak pihak pertama (*shahibul mal* atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dan

pihak kedua (*mudharib* atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya pihak pertama.<sup>15</sup>

Dari hasil penelitian dan observasi menurut BPRS Bhakti Sumekar Sumenep *mudharabah* merupakan akad kerjasama usaha antara bank sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan nasabah sebagai pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha dengan nisbah pembagian hasil menurut kesepakatan dimuka. Prinsipnya dalam penyaluran *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan maka bank dapat meminta jaminan dari pengelola dana.

Debitur memperoleh kredit terlebih dahulu harus melalui tahapan-tahapan penilaian. Tujuan prosedur pemberian kredit yaitu untuk memastikan kelayakan suatu kredit, diterima atau ditolak. Penentu kelayakan suatu kredit dalam setiap tahap dilakukan penilaian mendalam.<sup>16</sup> Sedangkan prosedur pembiayaan pada BPRS Bhakti Sumekar sebagai berikut:

#### 1) Tahapan Permohonan Pembiayaan

Tahap permohonan pembiayaan dimulai dari nasabah datang menemui admin pembiayaan untuk melakukan permohonan pembiayaan sesuai dengan kebutuhan nasabah. Nasabah akan mengisi formulir permohonan pembiayaan sekaligus dengan beberapa syarat yaitu, foto copy KTP suami dan istri, KK, surat nikah, NPWP, dan lainnya, dokumen tersebut akan diserahkan kepada admin pembiayaan. Admin pembiayaan akan melakukan registrasi dengan pengisian aplikasi pembiayaan. Pengadministrasian yaitu dokumen-dokumen yang sudah

---

<sup>15</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga*, hlm.170

<sup>16</sup> Kasmir, *Manajemen.*, hlm. 105.

diajukan kepada admin akan dicek kelengkapannya, jika sudah sesuai dengan ketentuan yang ada di BPRS Bhakti Sumekar Sumenp, maka akan diberi nomer register dan akan dilakukan pengarsipan.

## 2) Tahapan Penilaian Pembiayaan

Tahap penilaian pembiayaan dilakukan setelah berkas selesai diadministrasikan. Data nasabah akan dilakukan pengecekan oleh bagian Sistem Informasi Debitur apakah calon nasabah belum, sudah, atau sedang mendapatkan pembiayaan dari bank lain dan apakah calon nasabah memiliki masalah dengan bank lain dan termasuk dalam daftar hitam di Bank Indonesia.

*Account Officer* yang sudah diberi tanggung jawab akan melakukan survei lokasi. *Account Officer* akan mengunjungi nasabah untuk melakukan pengumpulan data nasabah yaitu, legalitas, keuangan nasabah, jaminan, gambaran usaha, dan prediksi keuangan. *Account Officer* akan melakukan analisa pembiayaan dengan beberapa aspek yaitu identitas nasabah, mengecek legalitas dokumen, menaksir jaminan apakah sesuai dengan pembiayaan yang diajukan, analisa laporan keuangan nasabah, analisa usaha yang dilakukan oleh nasabah, dan kelancaraan usaha kedepannya. Aspek legalitas nasabah dalam pembiayaan *mudharabah* sebagai berikut:

- a) Legalitas nasabah terdiri dari KTP, SIM, Paspor, Kartu Keluarga, dan Tempat tinggal.
- b) Legalitas usaha terdiri dari bentuk usaha, status tempat usaha dan juga jenis usahanya.
- c) Legalitas jaminan seperti kendaraan, barang berharga, tanah, dan juga lainnya.

- d) Legalitas akad terdiri dari judul, jenis, dan isi dari perjanjian akad tersebut, pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian pembiayaan, dan juga nama dan tanda tangan dari pihak-pihak yang terlibat.

### 3) Tahapan Persetujuan Pembiayaan

Tahapan persetujuan pembiayaan dilakukan setelah *Account Officer* melaporkan hasil dari survei lokasi, dan melakukan musyawarah dengan bagian komite pembiayaan untuk memutuskan pembiayaan layak atau tidak. Pembiayaan ditolak seluruh dokumen akan dikembalikan beserta surat penolakan. Pembiayaan diterima *Account Officer* akan mempuat surat persetujuan pembiayaan yang akan ditandatangani oleh komite pembiayaan. Bagian legalisasi akan mengecek data dan verifikasi dokumen yang sudah dilampirkan.

### 4) Tahapan Pelaksanaan Akad dan Realisasi Pembiayaan

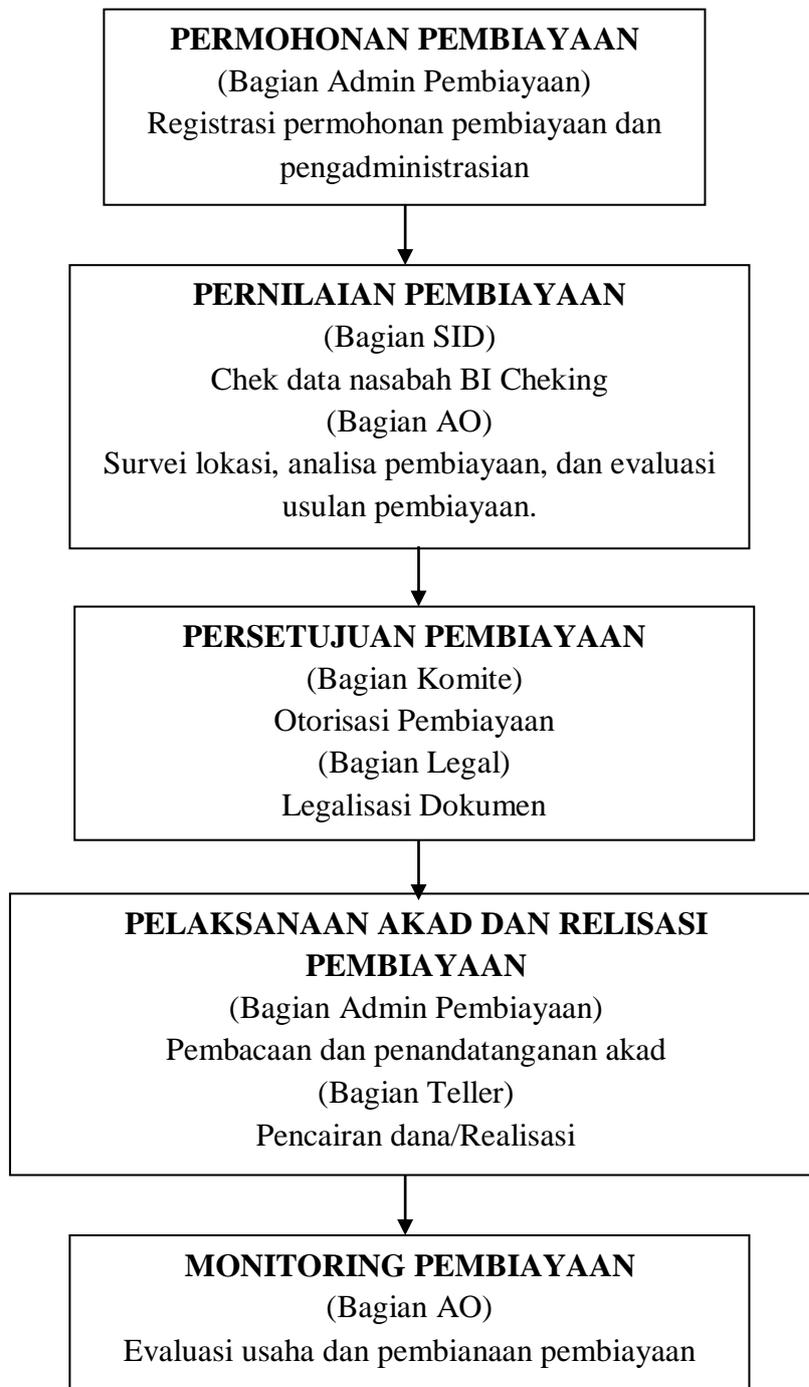
Bagian admin pembiayaan bersama nasabah akan melakukan pembacaan akad yang terdiri dari, jenis akad, pihak yang membuat perjanjian pembiayaan, isi dari akad dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah selama melakukan pembiayaan, dan terakhir penandatanganan akad oleh pihak yang terkait. Nasabah akan melakukan realisasi pembiayaan melalui teller dengan membawa surat permohonan realisasi pembiayaan dan dokumen yang diperlukan.

### 5) *Monitoring*

*Monitoring* dilakukan setelah pembiayaan direalisasikan. *Account Officer* yang bertugas dalam mengawasi usaha nasabah akan mengunjungi usaha nasabah untuk melakukan monitoring, apakah usaha nasabah sudah berjalan dengan baik atau terjadi kendala tertentu sehingga perlu pembinaan pembiayaan. Pembinaan

pembiayaan dilakukan untuk meningkatkan loyalitas nasabah terhadap BPRS Bhakti Sumekar Sumenep.

**Gambar 4.2**  
**Prosedur Pembiayaan**



## 2. Pengendalian Internal Pada Prosedur Penyaluran Produk Pembiayaan *Mudharabah* Di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep

Pengendalian internal adalah metode/sistem yang dirancang oleh perusahaan untuk meningkatkan efisiensi, mengamankan harta, menjaga ketelitian data perakunan, menegakkan disiplin, dan meningkatkan ketaatan karyawan terhadap kebijakan perusahaan.<sup>17</sup> Pengendalian internal terdiri dari rencana suatu usaha untuk (i). Mengamankan *asset* (harta perusahaan), (ii). Mengecek keakuratan, dan (iii). Data akuntansi yang dapat dipercaya, sehingga dapat meningkatkan operasional secara efisien dan meningkatkan ketaatan terhadap kebijakan manajerial.<sup>18</sup>

Pengendalian internal di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep memiliki peran sangat penting dalam pemberian pembiayaan. Pengendalian internal merupakan sistem yang dirancang untuk mengontrol, mengawasi, mengarahkan suatu usaha agar mencapai tujuan. Pengendalian pembiayaan ada untuk meminimalisir adanya pembiayaan macet yang disebabkan adanya kelalaian dari pihak nasabah sendiri atau juga dari pihak internal BPRS Bhakti Sumekar Sumenep. Berdasarkan pendekatan prinsip COSO, pengendalian internal terhadap pembiayaan *mudharabah* di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep sebagai berikut:

- a. Lingkungan pengendalian menjadi arahan bagi organisasi dan juga mempengaruhi kesadaran orang-orang dalam organisasi tersebut, hal tersebut meliputi sikap yang dikeluarkan oleh manajemen dan staf dalam pengendalian internal di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep.

---

<sup>17</sup> Putri, *Kamus*, hlm. 183.

<sup>18</sup> Andayani, *Audit*, hlm. 46.

- 1) Integritas dan Nilai Etika, tergambar dalam pelayanan BPRS Bhakti Sumekar Sumenep yang menerapkan sistem salam, senyum, dan sapa. Integritas dan etika merupakan dua sikap yang harus diutamakan karena terletak di pusat kota yang sangat menjunjung nilai etika dan menjadi kebiasaan bagi masyarakat setempat, terlebih BPRS Bhakti Sumekar Sumenep merupakan lembaga keuangan yang menjadikan hukum syariah sebagai salah satu landasannya, sehingga transparansi, kejujuran, dan saling menghormati merupakan kewajiban yang harus dilakukan, dalam hal ini BPRS Bhakti Sumekar Sumenep sudah menerapkan integritas dan nilai etika dengan baik.
- 2) Komitmen terhadap kompetensi, penempatan karyawan di BPRS Bhakti Sumekar Semenep sesuai dengan kompetensi yang mereka miliki agar mampu melakukan tugas sesuai dengan *job description* yang ada. Di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep untuk menunjang kompetensi karyawan melakukan kegiatan pelatihan dan *workshop* karyawan sesuai dengan tema dan bidang masing-masing,, dalam hal ini BPRS Bhakti Sumekar Sumenep sudah menerapkan komitmen terhadap kompetensi dengan baik.
- 3) Partisipasi dewan komisaris dan komite audit. Dewan komisaris melakukan pengawasan terhadap terhadap kinerja manajemen, Dewan komisaris di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep harus terdiri minimal dua orang yang merupakan komisaris Independen yang tidak terikat oleh lembaga, sedangkan Komite audit melakukan pengawasan

terhadap struktur Pengendalian Internal. Dalam hal ini partisipasi dewan komisaris dan komite audit sudah cukup baik.

- 4) Falsafah manajemen dan gaya operasinya, BPRS Bhakti Sumekar Sumenep menerapkan kebijakan- kebijakan yang harus dipatuhi oleh semua manajemen dan karyawan. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep dalam melakukan operasional harus sesuai dengan kebijakan manajemen, sehingga karyawan akan mempunyai motivasi untuk mencapai target yang akan dicapai. Dalam hal ini falsafah manajemen dan gaya operasinya sudah dilakukan dengan baik.
  - 5) Struktur Organisasi, di BPRS Bhakti Sumekar struktur organisasi sudah menggambarkan tugas dan kewajiban masing-masing karyawan. Dan setiap bagian memiliki *job description* masing-masing sebagai panduan dalam melakukan pekerjaan. Dalam hal ini stuktur organisasi telah diterapkan dengan baik.
  - 6) Kebijakan sumber daya manusia dan prosedurnya, di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep sudah diterapkan dengan baik yang dibuktikan dengan diadakannya pelatihan-pelatihan, *workshop*, dan pemberian *job training* untuk karyawan baru. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep untuk memberikan penghargaan karyawan yang sudah lama bekerja dan memiliki kompetensi yang baik biasanya memberikan *reward* berupa kenaikan jabatan.
- b. Penilaian Risiko mencakup disemua aspek organisasi dan penentuan kekuatan organisasi melalui evaluasi risiko. Penilaian risiko juga berfungsi untuk meningkatkan efektivitas pengendalian dan untuk menilai

peningkatan tersebut dapat dimonitor melalui penilaian yang khusus serta serta sejalan usaha manajemen.

- 1) Tujuan perusahaan secara keseluruhan BPRS Bhakti Sumekar Sumenep diantaranya terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan dilandasi nilai-nilai agama yaitu dengan memberikan pelayanan pada masyarakat sebaik-baiknya. Hal tersebut terlaksana dengan baik dibuktikan dengan semakin meningkatnya nasabah BPRS Bhakti Sumekar Sumenep setiap tahunnya.
  - 2) Tujuan disetiap tingkat proses. Setiap bagian atau divisi pada BPRS Bhakti Sumekar Sumenep memiliki rencana kerja yang harus tercapai setiap tahunnya. Hal tersebut menjadi acuan setiap karyawan untuk melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya untuk mencapai rencana kerja atau juga target yang sudah ada.
  - 3) Identifikasi risiko dan analisisnya. Pengidentifikasian risiko yang dilakukan di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep sudah berjalan cukup baik, karena sudah klarifikasikan dengan rinci bagian-bagian yang mampu mengidentifkasi risiko, hal tersebut salah satunya adalah divisi manajemen risiko. Manajemen risiko disini akan mengidentifikasi risiko pembiayaan dan dilakukan analisis pembiayaan.
- c. Aktivitas Pengendalian Internal merupakan kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Aktivitas-aktivitas ini meliputi persetujuan, tanggung jawab dan kewenangan, pemisahan tugas, pengendalian pengelolaan informasi, karyawan yang kompeten dan jujur, pemeriksaan internal dan audit internal.

- 1) Kebijakan dan prosedur di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep sudah baik, sebab setiap pemberian pembiayaan memiliki prosedur baik yang berlaku bagi nasabah maupun karyawan. Setiap melakukan pemberian pembiayaan harus melalui persetujuan manajemen, hal ini menggambarkan pengendalian internal dalam prosedur pemberian pembiayaan.
- 2) Keamanan dalam hal aplikasi dan jaringan di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep dikatakan cukup baik. Aplikasi pembiayaan akan otomatis terhubung dalam sistem hal ini memudahkan manajemen dalam melakukan aktivitas pengendalian. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep baru meluncurkan aplikasi untuk nasabah pada 2018 dan hanya sebagian kecil yang mengaplikasikannya. Dan untuk mencegah hal tidak diharapkan sudah ada tim IT yang siap untuk mencegah dan menyelesaikannya.
- 3) Manajemen perubahan aplikasi di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep dalam hal perubahan manajemen aplikasi masih belum pernah dilakukan, sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan penginovasian yang dilakukan cukup baik.
- 4) Keberlangsungan bisnis, BPRS Bhakti Sumekar Sumenep untuk keberlangsungan dari BPRS Bhakti Sumekar manajemen terus-menerus melakukan evaluasi dan inovasi bersama seluruh pimpinan dan dewan komisaris maupun Dewan Pengawas Syariah untuk menciptakan sesuai dengan keinginan nasabah dan untuk terciptanya lembaga keuangan yang lebih baik.

d. Informasi dan Komunikasi tentang operasi pengendalian internal memberikan substansi yang dapat digunakan manajemen untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian dan untuk mengelola operasinya. Kualitas informasi yang dihasilkan oleh sistem berdampak pada kemampuan manajemen untuk mengambil keputusan.

1) Kualitas Informasi, informasi dalam pemberian pembiayaan harus sesuai dengan kondisi yang ada dilapangan. *Account Officier* harus memberikan informasi yang sebenar-benarnya kepada pihak manajemen untuk mengambil keputusan pemberian pembiayaan. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep juga memberikan informasi keuangan yang dilaporkan ke publik disetiap triwulan.

2) Efektivitas Komunikasi, di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep setiap minggu diadakan rapat mingguan untuk menjalankan komunikasi yang baik dalam setiap devisi. Hal ini untuk mengkomunikasikan kendala-kendala yang terjadi setiap minggunya. Komunikasi yang baik akan memberikan informasi yang baik.

e. Pengawasan atau pemantauan merupakan evaluasi rasional yang dinamis atas informasi yang diberikan pada komunikasi informasi untuk tujuan manajemen pengendalian. Pengawasan atau pemantauan bertujuan untuk menentukan apakah pengendalian masih sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai atau perlu adanya perbaikan.

1) Pengawasan yang terus berlangsung, pengawasan di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep dilakukan dengan baik sebab pemantauan terus dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan. Dan juga dilakukan

dengan melihat pelaksanaan dilapangan apakah sudah sesuai dengan aturan dan standar yang ditetapkan oleh BPRS Bhakti Sumekar Sumenep.

- 2) Evaluasi yang terpisah, Setiap kepala divisi di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep akan melakukan pemantauan yang dilakukan setiap bawahannya melalui aplikasi yang langsung terhubung kepada semua pihak. Dengan ini kepala devisi dengan mudah mengontrol yang dilakukan oleh devisinya.

Dari beberapa komponen tersebut pengendalian internal menurut COSO sudah berjalan dengan baik. Hal itu sejalan dengan pernyataan auditor eksternal KAP. Thoufan dan Rosyid yaitu, laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, dan hasil usahanya dan arus kas sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.